

Pengaruh Belanja Subsidi Pemerintah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Nur Halijah^{*1}, Muhammad Syafri²

^{1,2}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar,
Jalan Raya Pendidikan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90222

*Penulis Korespondensi: Liliywas962@gmail.com

Abstract. *Income inequality and poverty continue to be significant obstacles to economic growth. To address these issues, the government implements subsidy policies as one of the fiscal instruments aimed at improving public welfare while promoting a more equitable income distribution. The purpose of this investigation is to examine how government subsidy spending affects income inequality as determined by the Gini coefficient. This study uses a straightforward linear regression method in a quantitative manner. Secondary time series data from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and Badan Pusat Statistik (BPS) were used. In this investigation, government subsidy expenditure serves as the independent variable, while income inequality is the dependent variable. The findings show government subsidy expenditure has a significant effect on income inequality, with a significance value of 0.000 (< 0.05) also a t-statistic of -4.920. According to the negative regression coefficient, a rise in subsidy spending is linked to a fall in income disparity. Additionally, the coefficient of determination (R^2) of 0.651 suggests that subsidy expenditure accounts for 65.1% of the variance in income inequality, with other factors outside the model influencing the remaining 34.9%.*

Keywords : *Spending subsidies, Income inequality, Gini coefficient, Fiscal policy, Income distribution*

Abstrak. Kemiskinan serta ketimpangan pendapatan mewujudkan permasalahan krusial pada tahapan pembangunan ekonomi. Dalam upaya mengatasinya, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi sebagai satu di antara instrumen fiskal yang diarahkan guna menaikkan kemakmuran warga sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan. Studi ini mempunyai tujuan guna menganalisa pengaruh belanja subsidi pemerintah pada tingkat ketimpangan pendapatan, dinilai memakai koefisien Gini. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisa regresi linear sederhana. Data yang dipakai ialah data sekunder dengan wujud time series yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) serta DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Pada studi ini, belanja subsidi pemerintah berperan sebagai variabel independen, sedangkan ketimpangan pendapatan menjadi variabel dependen. Temuan analisa memperlihatkan ketimpangan pendapatan terpengaruh nyata oleh belanja subsidi, dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) serta nilai t hitung -4,920. Koefisien regresi bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan belanja subsidi cenderung diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Selain itu, nilai koefisien determinasi 0,651 memperlihatkan 65,1% variasi ketimpangan pendapatan bisa divisualisasikan belanja subsidi, sementara sisanya terpengaruhi aspek lain di luar model studi.

Kata Kunci : Belanja subsidi, Ketimpangan pendapatan, Koefisien Gini, Kebijakan fiskal, Distribusi pendapatan

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan dua permasalahan sosial ekonomi yang saling berkaitan dan menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Kemiskinan bukan sekedar dipahami sebagai rendahnya pemasukkan, namun serta mencerminkan keterbatasan akses masyarakat pada berbagai keperluan primer, misalnya pendidikan, sandang, pangan, layanan kesehatan, serta fasilitas publik lainnya (Insani, 2025). Berlandaskan data BPS (Badan Pusat Statistik), persentase warga miskin

Indonesia, di September tercatat sebesar 8,5% atau sekitar 23,36 juta jiwa (Bps, 2026b). Pada tingkat provinsi, Papua Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu mencapai 29,45%. Sebaliknya, Bali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah dengan persentase sebesar 3,73% (Bps, 2026c). Angka tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan ekonomi yang telah dilakukan masih belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Al Aqilah et al., 2024).

Disparitas pendapatan ialah salah satu determinan, berpotensi memperburuk tingkat kemiskinan. Fenomena ini muncul saat distribusi pendapatan antarindividu atau kelompok masyarakat berlangsung tidak proporsional (Prawesti Ningrum et al., 2024). Berlandaskan data BPS tahun 2026, nilai gini rasio Indonesia pada september 2025 tercatat sebesar 0,381 yang mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara nasional. Pada tingkat provinsi, DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi dengan nilai gini rasio sebesar 0,441. Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung mewujud provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah, nilai gini rasio 0,222 (Bps, 2026a). Tingginya derajat ketimpangan berimplikasi pada munculnya beragam konsekuensi sosial-ekonomi yang bersifat merugikan, antara lain meningkatnya potensi terjadinya konflik sosial, terbatasnya mobilitas sosial dalam masyarakat, serta terhambatnya realisasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam kerangka tersebut, kesenjangan pendapatan tidak lagi sekadar dipandang sebagai isu ekonomi, melainkan telah bertransformasi menjadi problematika sosial yang menuntut atensi serta intervensi yang serius dari pemerintah (Al Aqilah et al., 2024).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di dalam negeri (Wulandari, 2025). Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pemberian subsidi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah (Nabilah & Addainur, 2025). Pemerintah memberikan subsidi sebagai salah satu instrument kebijakan untuk membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah, menurunkan biaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan ini, daya beli masyarakat diharapkan meningkat sehingga kelompok

dengan keterbatasan ekonomi dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya dan secara bertahap memperbaiki kondisi kesejahteraan mereka yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan (Soen et al., 2022). Namun, beberapa hasil penelitian di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan temuan karena menghasilkan hasil yang beragam (Ramdani, 2024). Maka sebab itu, dibutuhkan analisa dalam guna mengkaji dampak subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki distribusi pemasukkan. Maka sebab itu, studi ini mempunyai tujuan guna menganalisa peran subsidi pemerintah dalam memenuhi distribusi pendapatan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State Theory)

Peran bangsa yang secara aktif bertanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan sosial, kondisi ekonomi, serta kebutuhan dasar seluruh masyarakat. Melalui perspektif ini, bangsa bukan sekedar bertugas selaku penjaga keamanan juga penegak hukum, namun serta memiliki peran terhadap menciptakan keadilan sosial juga menyalurkan perlindungan pada masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan kemiskinan maupun ketimpangan (Kusuma, 2016; Arifin et al., 2024). Negara kesejahteraan berusaha menekan ketimpangan dengan menghadirkan jaminan sosial, pelayanan kesehatan, Pendidikan, serta kesempatan guna bekerja yang dapat diakses oleh semua elemen warga tanpa melihat latar belakang ekonomi ataupun sosial. Pada intinya, teori ini memposisikan negara sebagai pihak yang menyeimbangkan antara mekanisme pasar dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi setiap individu (Muda, 2021; Arifin et al., 2024).

Dalam upaya mengurangi ketimpangan pemasukkan, pemerintah menjalankan regulasi redistribusi dengan menarik pajak kelompok berpendapatan besar, kemudian menyalurkannya pada warga berpendapatan kecil melewati subsidi maupun sokongan sosial. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan (social welfare) yang optimal, yaitu saat manfaat tambahan (marginal utility) yang diperoleh masyarakat berpenghasilan tinggi dari pembayaran panajak sebanding dengan manfaat tambahan yang diterima masyarakat penerima bantuan sosial (Rosen & Gayer, 2014 dalam Ramdani, 2024).

Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan

Menurut Sukirno (2006), distribusi pendapatan pada dasarnya ialah konsep yang membahas penyebaran pendapatan di antara individu atau rumah tangga dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memicu perbedaan antarwilayah. Dalam perspektif hipotesis kurva U terbalik, pada fase awal pertumbuhan ekonomi atau pembangunan, ketidakmerataan pendapatan cenderung meningkat. Seiring dengan berlangsungnya proses pembangunan, distribusi pendapatan cenderung mengalami perbaikan dan menjadi lebih merata. Kondisi ini terjadi sebab dalam tahapan awal pembangunan di bangsa berkembang, peluang serta manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan oleh wilayah yang lebih maju, sedangkan daerah tertinggal belum mampu memanfaatkannya akibat keterbatasan infrastruktur serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2006). Salah satu alat umum yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan adalah koefisien gini, yang menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan tidak merata, nilai koefisien gini ini berkisar antara 0, yang menunjukkan pemerataan sempurna hingga 1, yang menunjukkan ketimpangan total (Makipantung et al., 2023).

Subsidi Pemerintah

Subsidi merupakan bantuan berupa uang atau komoditas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau kelompok tertentu untuk meringankan beban penerima dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Spencer dan Amos dalam *Contemporary Economics*, subsidi adalah pembayaran dari pemerintah pada rumah tangga ataupun korporasi guna menggapai sebuah sasaran yang bermanfaat bagi penerimanya (Soen et al., 2022). Pemerintah memberikan berbagai jenis subsidi, antara lain subsidi energi seperti bahan bakar, gas, dan listrik. Subsidi pangan dan pertanian, termasuk pupuk, benih, serta stabilisasi harga pangan. Subsidi kesehatan dan sosial, misalnya PBI (Penerima Bantuan Iuran), Jaminan Kesehatan dan PKH (Program Keluarga Harapan), serta subsidi perumahan, seperti bantuan uang muka, subsidi selisih Bunga, dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) (Damanik, 2024; Poltekbang, 2025). Pemberian subsidi ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas perekonomian (Poltekbang, 2025).

Berdasarkan temuan penelitian Abimanyu & Imansyah, (2023) menunjukkan bahwa subsidi BBM (bahan bakar minyak) lebih banyak dipakai kelompok warga berpendapatan tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan rendah, sehingga kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Namun, Ramdani (2024) menemukan bahwa belanja subsidi dan bantuan sosial memengaruhi nilai koefisien gini, yang mengindikasikan bahwa distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah:

H1 = Subsidi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap distribusi pendapatan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisa regresi linear sederhana guna menganalisis pengaruh belanja subsidi pemerintah terhadap distribusi pemasukkan di NKRI. Data yang analisis berupa data sekunder berupa runtun waktu (*time series*) dalam kurun 15 tahun. Pendekatan kuantitatif digunakan sebab penelitian ini berfokus pada pengujian korelasi sebab-akibat antara variabel bebas serta variabel terikat secara statistik, sehingga hasil analisis dapat diuji tingkat signifikansinya serta memiliki kemampuan untuk digeneralisasi (Pandiangan & Albina, 2025 dalam Alamsyah & Syafri, 2026). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dihimpun dari dua Lembaga utama, yaitu BPS serta DJPK.

Data yang digunakan mencakup nilai gini rasio sebagai indikator ketimpangan pendapatan serta total realisasi anggaran belanja subsidi pemerintah. Seluruh data disusun dalam bentuk tahunan (*time series*) guna menjaga konsistensi periode peninjauan selama proses analisa (Maharani *et al.*, 2026 dalam Alamsyah & Syafri, 2026). Studi ini melibatkan dua variabel pokok yang diartikan dengan operasional. Variabel independent (X) ialah belanja subsidi pemerintah, sedangkan variabel dependen (Y) adalah ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini rasio nasional. Penelitian ini menerapkan model regresi linear sederhana yang dirumuskan dalam bentuk persamaan.

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon$$

Keterangan:

Y_t = Gini ratio pada tahun t

- X_t = Belanja subsidi pemerintah
 α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
 ε = *Error term*

Pengolahan serta analisa data pada studi ini dilaksanakan memakai bantuan SPSS. Sebelum tahap estimasi regresi dilakukan, Sebelum digunakan, model lebih dulu diuji melewati serangkaian pengujian asumsi klasik, melingkupi uji normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (t), uji simultan (F), serta koefisien determinasi (R²) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00650470
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.101
	Negative	-.129
Test Statistic		.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang melampaui taraf signifikansi 0,05. Temuan tersebut menunjukkan bahwa residual

pada model penelitian terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi dinyatakan telah terpenuhi.

2. Uji Linearitas

Tabel 2. Hasil uji linearitas

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Koefisien gini*	Between	(Combined)	.002	11	.000	13.963	.026
Belanja Subsidi	Groups	Linearity	.002	1	.002	101.883	.002
		Deviation from linearity	.001	10	.000	5.171	.101
	Within groups		.000	3	.000		
Total			.002	14			

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berdasarkan pengujian linearitas, diperoleh nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,101, yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel belanja subsidi dan koefisien gini dapat dianggap linear. Selain itu, nilai signifikansi pada komponen linearitas tercatat hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0.002, lebih kecil dari 0.05 sehingga mengindikasikan adanya hubungan linear yang signifikan antar variabel. Maka sebab itu, asumsi linearitas pada model regresi dinilai terpenuhi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil uji heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.008	.002		4.181	.001
Belanja subsidi	-4.782E-9	.000	-.250	-.932	.368

Sumber: Hasil olah data SPSS

Temuan pengujian heteroskedastisitas dengan metode glejser memperlihatkan nilai signifikansi untuk variabel belanja subsidi 0.368, ada di atas tingkat signifikansi 0.05 menunjukkan model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi ini dapat dinyatakan terpenuhi.

B. Uji Regresi Sederhana

1. Uji T

Tabel 4. Hasil uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.408	.004		113.227	.000
Belanja subsidi	-4.924E-8	.000	-.807	-4.920	.000

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berlandaskan uji t, didapat nilai t hitung -4,920, signifikansi 0,000 (< 0,05). Temuan ini memperlihatkan koefisien Gini terpengaruh nyata oleh belanja subsidi. Arah koefisien negatif juga menandakan kian besar belanja subsidi, maka tingkat ketimpangan pendapatan cenderung menurun.

2. Uji Determinan (R^2)

Tabel 5. Hasil uji determinan (R^2)

Model Summary			
Model	R	R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 ^a	.651	.00799

Sumber: Hasil olah data SPSS

Berlandaskan temuan uji koefisien determinasi didapat nilai R^2 0.651. Nilai tersebut mencerminkan bahwa variabel belanja subsidi mampu menjelaskan sebesar 65.1% variasi pada koefisien gini, sementara 34.9% terpengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk pada model penelitian.

Berdasarkan temuan analisa regresi linear sederhana, teridentifikasi variabel belanja subsidi pemerintah berpengaruh secara nyata terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dinilai melewati koefisien gini. Hal ini terlihat dari uji parsial (uji t) memperlihatkan nilai t hitung -4.920, tingkat signifikansi 0.00 lebih kecil dari batas signifikansi 0.05. Maka sebab itu, secara statistik bisa ditarik simpulan koefisien gini terpengaruh nyata oleh belanja subsidi. Maka sebab itu itu hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh subsidi terhadap pendapatan dinyatakan diterima. Koefisien regresi bernilai negatif memperlihatkan terdapatnya korelasi yang berlawanan belanja subsidi dengan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, peningkatan alokasi subsidi

pemerintah cenderung diikuti oleh penurunan nilai koefisien gini, yang berarti tingkat ketimpangan pendapatan semakin menurun.

Secara ekonomi, kondisi ini dapat dijelaskan bahwa pemberian subsidi baik dalam bentuk subsidi energi maupun bantuan sosial, mampu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Dampaknya, distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Soen *et al.*, 2022). Hasil ini juga sejalan dengan konsep dalam *Welfare State Theory* yang menekankan bahwa campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal, seperti subsidi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan sosial ekonomi (Arifin *et al.*, 2024). Selain itu, penelitian oleh Hartanti & Taufiq (2023) turut memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa subsidi khususnya di sektor energi, merupakan instrument kebijakan yang cukup efektif dalam menekan kesenjangan pemasukkan pada NKRI

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa belanja subsidi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia yang diukur dengan koefisien gini. Hal ini dari nilai signifikansi yang <0.05 serta koefisien regresi yang bernilai negatif yang bermakna peningkatan belanja subsidi cenderung diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Nilai R^2 0.651 memperlihatkan 65.1% variasi ketimpangan pendapatan bisa divisualisasikan variabel belanja subsidi, sedangkan sisanya dipengaruhi aspek lain luar model penelitian. Dengan demikian, subsidi dapat dipahami sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berperan dalam mendorong pemerataan distribusi pendapatan, sejalan dengan konsep *Welfare State Theory* yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan temuan studi beberapa saran yang bisa diajukan ialah.

1. Untuk peneliti berikutnya, dianjurkan guna menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB), tingkat penangguran, inflasi dan Pendidikan agar analisis lebih komprehensif dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan. Pemakaian metode kian kompleks, misalnya linear berganda ataupun pendekatan

ekonometrika lainnya juga diperlukan agar hubungan antar variabel dapat dianalisis dengan akurat.

2. Bagi pemerintah, temuan ini dapat dijadikan pertimbangan dalam merancang kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran sehingga efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Di samping itu, kebijakan subsidi perlu diintegrasikan dengan upaya lain, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas Pendidikan agar dampaknya terhadap pemerataan pendapatan menjadi optimal

DAFTAR REFERENSI

- Abimanyu, A., & Imansyah, M. H. (2023). The Impact of Fuel Subsidy to the Income Distribution: The Case of Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 189–203. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.932>
- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Alamsyah, & Syafri, M. (2026). Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur : Studi pada Hubungan Trade Openness dan Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v3i2.2212>
- Al Aqilah, M. R., Muchtar, M., & Robinson Sihombing, P. (2024). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.684>
- Arifin, M. Z., Nugraha, M., Yunithia Putri, T., & Ramadhan, M. S. (2024). Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif. *Journal Of Law And Social Society*, 1(2), 29–42. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2.158>
- Bps. (2026a). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-rasio--september-2025.html>
- Bps. (2026b). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah, 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1IzI=/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Bps. (2026c). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--september-2025.html>
- Michael Todaro, Stephen C. Smith. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. (Pearson Education Limited. United Kingdom : 2006). 45.
- Damanik, J. H. (2024). Efektivitas Program Subsidi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. *Tugas Mahasiswa Ekonomi*, 1–10. <https://coursework.uma.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/1337/930>
- Hartanti, A. N., & Taufiq, M. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Subsidi Bbm Terhadap Disparitas Pendapatan Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 626–636. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6311>
- Insani, A. (2025). Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(10), 626–632.
- Kusuma, D. R. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustakasetia.
- Maharani, W. S., Hardiyanti, D. Y., Informasi, S., Sriwijaya, U., Negara, J. S., Lama, B., Palembang, K., Bumi, M., & Series, T. (2026). Penerapan Metode Long Short-Term

- Memory Untuk Prediksi Produksi Minyak Bumi Berdasarkan Data Time Series Harian. 10(1),420–427
- Makipantung, R. O., Walewangko, E. N., & Niode, A. O. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Wilayah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 157–168.
- Muda, I. (2021). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 3.
- Nabilah, I. Z., & Addainur, M. I. (2025). Peran Pemerintah Dalam Menyeimbangkan Subsidi Sebagai Kebijakan Fiskal Untuk Mendukung Perekonomian Tiga Sektor. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis (JMEBI)*, 1(2), 59–75. <https://journal.cenderawasih.id/index.php/jmebi> ISSN
- Pandiangan, D. F., & Albina, M. (2025). Model dan Tahapan Penelitian Kuantitatif : Pendekatan Teoretis dan Praktis dalam Kajian Pendidikan. 724–730
- Poltekbang. (2025). *Mengenal Berbagai Jenis Subsidi Pemerintah: Penopang Kesejahteraan dan Pendorong Perekonomian Rakyat*. Politeknik Penerbangan Palembang. <https://poltekbangplg.ac.id/mengenal-berbagai-jenis-subsidi-pemerintah-penopang-kesejahteraan-dan-pendorong-ekonomi-rakyat/>
- Portal Data SKID. 2026. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Prawesti Ningrum, E., M, S., Endah Nursyamsi, S., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 116–126. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i2.3480>
- Ramdani, S. A. (2024). Dampak Belanja Subsidi Dan Bantuan Sosial Dari APBD Terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 57–77. https://www.researchgate.net/profile/Sandi-Ramdani-2/publication/382888995_Dampak_Belanja_Subsidi_dan_Bantuan_Sosial_dari_APBD_terdapat_Kesenjangan_Pendapatan_di_Indonesia/links/66b1f58b2361f42f23b580c1/Dampak-Belanja-Subsidi-dan-Bantuan-Sosial-dari-APBD-
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(1), 84–92. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92>
- Sukirno. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (2nd ed.). Kencana (Prenada Media).
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.
- Wulandari, N. (2025). Analisis Pengaruh Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Subsidi, dan PDRB Terhadap Tingkat Ketimpangan Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2020-2024 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Di Indonesia Area Sumatra) [Universitas Islam Negeri Raden Intan]. <https://repository.radenintan.ac.id/41114/>